



Legitimasi dan Delegitimasi dalam Narasi Digital Sengketa Ijazah Presiden Joko Widodo: Analisis Wacana Kritis

Saiyidinal Firdaus*, Linguistik Terapan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik linguistik, diskursif, dan partisipasi publik bekerja dalam membentuk legitimasi melalui narasi digital mengenai sengketa ijazah Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Analisis Wacana Kritis model Fairclough. Data penelitian terdiri atas video dan komentar pengguna YouTube yang membahas sengketa ijazah Presiden Joko Widodo. Data tersebut dipilih secara purposif berdasarkan tingkat keterlihatan dan intensitas interaksi publik, kemudian dianalisis melalui dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan legitimasi dan delegitimasi berlangsung melalui penggunaan fitur linguistik tertentu, seperti modalitas, nominalisasi, konstruksi pasif, pelabelan evaluatif, dan penghilangan agensi. Pada tingkat praktik diskursif, narasi tidak diproduksi secara linear oleh institusi media, tetapi direproduksi melalui komentar, evaluasi, dan interaksi publik yang memperluas visibilitas isu. Komentar pengguna tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap informasi, tetapi juga menjadi praktik produksi makna yang ikut menentukan orientasi legitimasi dalam ruang digital. Temuan juga menunjukkan bahwa distribusi narasi dipengaruhi oleh intensitas reproduksi dan keterlibatan publik yang memperkuat keberlangsungan isu dalam ruang komunikasi digital. Dengan demikian, legitimasi politik dalam lingkungan digital dipahami sebagai hasil interaksi antara praktik bahasa, sirkulasi narasi, dan partisipasi pengguna.


RIWAYAT ARTIKEL

Diajukan	12 Mei 2026
Direvisi	24 Mei 2026
Diterima	26 Mei 2026
Dipublikasikan	2 Juni 2026

KATA KUNCI

analisis wacana kritis; narasi digital; legitimasi politik; partisipasi publik; sengketa ijazah

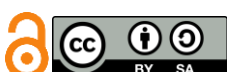
*PENULIS KORESPONDENSI

 saiyidinalfirdaus1995@gmail.com

PENDAHULUAN

Penelitian ini berangkat dari menguatnya kontestasi narasi digital mengenai sengketa ijazah Presiden Joko Widodo yang berkembang secara luas melalui media sosial dan platform berbasis video di Indonesia. Dalam ekosistem komunikasi digital kontemporer, informasi tidak lagi bergerak secara linear melalui institusi media formal, tetapi diproduksi, diperdebatkan, disirkulasikan, dan dimaknai ulang secara partisipatif oleh berbagai aktor publik. Akibatnya, isu yang pada awalnya berkaitan dengan validitas dokumen akademik berkembang menjadi peristiwa diskursif yang melibatkan pertarungan interpretasi, pembentukan opini publik, serta negosiasi legitimasi politik di ruang publik digital. Dalam konteks tersebut, legitimasi akademik seorang tokoh publik tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan administratif atau legal, tetapi menjadi bagian dari mekanisme pembentukan kepercayaan publik dan otoritas simbolik.

Pentingnya isu kredensial akademik dalam pembentukan legitimasi publik telah banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Mullet (2018) menegaskan bahwa dokumen akademik yang dapat diverifikasi memiliki fungsi penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap praktik manipulasi dalam sistem pendidikan maupun kehidupan profesional. Sejalan dengan itu, Zhang (2023) menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap keabsahan kredensial pendidikan berkontribusi terhadap tingkat



kepercayaan masyarakat terhadap figur pemimpin. Dalam konteks politik, simbol akademik tidak hanya dipahami sebagai bukti administratif, tetapi juga sebagai representasi integritas, kompetensi, dan kredibilitas yang dapat memengaruhi legitimasi kepemimpinan.

Dalam perkembangan selanjutnya, sengketa ijazah Presiden Joko Widodo bergerak melampaui persoalan faktual mengenai keberadaan atau keabsahan dokumen pendidikan dan berkembang menjadi praktik diskursif yang mempertemukan kepentingan politik, ideologi, media, dan opini publik. Dari perspektif Analisis Wacana Kritis (AWK), fenomena tersebut tidak dipahami sebagai upaya menentukan benar atau salah atas suatu klaim, melainkan sebagai proses produksi dan negosiasi makna yang berkaitan dengan relasi kuasa serta pembentukan legitimasi sosial. Lux, Beierle, Zickau, & Gondor (2019) menjelaskan bahwa konteks sosial merupakan elemen penting dalam analisis wacana karena teks selalu berhubungan dengan struktur ideologi dan distribusi kekuasaan yang bekerja di balik proses komunikasi. Temuan Chen (2017) dan Ranabhat (2022) juga menunjukkan bahwa isu pendidikan dan integritas akademik kerap digunakan sebagai instrumen politik untuk membangun maupun meruntuhkan legitimasi publik terhadap figur tertentu.

Perkembangan media digital semakin memperumit pembentukan opini publik karena penyebaran informasi berlangsung cepat, terbuka, dan tidak selalu melalui proses verifikasi yang seragam. Narasi mengenai sengketa ijazah tidak hanya hadir melalui pemberitaan media, tetapi juga diperluas melalui komentar pengguna, reproduksi konten, interpretasi kolektif, dan praktik interaksi digital lainnya yang memunculkan spekulasi, polarisasi, serta kompetisi makna. Fenomena ini sejalan dengan temuan Bessi dkk. (2015), Lovelock (2017), serta Aviandy & Saleh (2020) yang menunjukkan bahwa reproduksi narasi secara berulang dalam ruang digital dapat memperkuat intensitas isu dan memperluas jangkauan pengaruhnya. Selain itu, Starbird dkk. (2016) dan Liu (2020) menjelaskan bahwa isu yang melibatkan figur publik cenderung mengalami perluasan makna dan peningkatan respons kolektif karena tingginya partisipasi pengguna dalam proses distribusi informasi.

Dengan demikian, sengketa ijazah Presiden Joko Widodo menjadi relevan dikaji bukan karena penelitian ini hendak menentukan validitas suatu dokumen, melainkan karena kasus tersebut memperlihatkan bagaimana ruang digital bekerja sebagai arena produksi, sirkulasi, dan kontestasi legitimasi politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembentukan makna publik tidak lagi sepenuhnya berada pada institusi formal, tetapi semakin dipengaruhi oleh dinamika partisipasi publik dan praktik diskursif yang berkembang dalam lingkungan media digital.

Perkembangan teknologi komunikasi dan ekspansi platform digital telah mengubah secara mendasar cara masyarakat memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi informasi dalam ruang publik. Dalam konteks komunikasi politik kontemporer, media digital tidak lagi dipahami hanya sebagai saluran penyebaran pesan, tetapi juga sebagai ruang interaktif yang memungkinkan pengguna berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan, reproduksi, dan transformasi makna sosial maupun politik. Perubahan tersebut menggeser pola komunikasi dari model yang bersifat institusional dan satu arah menuju praktik komunikasi yang lebih terbuka, terdesentralisasi, dan berbasis partisipasi publik. Dengan demikian, pembentukan opini publik pada era digital semakin dipengaruhi oleh interaksi pengguna, pola distribusi konten, dan dinamika keterlibatan audiens.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa narasi digital memiliki peran penting dalam membentuk identitas kolektif, memperkuat afiliasi sosial, serta menghasilkan polarisasi dalam masyarakat kontemporer. Li & Feng (2024) menjelaskan bahwa ruang digital memungkinkan terbentuknya identitas kolektif melalui reproduksi dan negosiasi makna yang berlangsung secara terus-menerus dalam interaksi daring. Temuan tersebut diperkuat oleh Hilton & Liu (2017) yang menunjukkan bahwa komunikasi digital tidak sekadar

mencerminkan opini publik, tetapi juga membentuk orientasi sosial dan struktur relasi antarpengguna dalam memahami suatu isu. Dalam konteks ini, narasi digital menjadi mekanisme penting yang menentukan bagaimana suatu peristiwa dipahami, diterima, diperdebatkan, atau ditolak oleh masyarakat.

Dalam kajian media dan politik, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa representasi bahasa dan strategi penyajian informasi memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan legitimasi publik. Bulan & Kasman (2018) menemukan bahwa praktik *framing* media berperan dalam membentuk persepsi politik melalui seleksi informasi dan penonjolan aspek tertentu dari suatu peristiwa. Sejalan dengan itu, Nurhayati & Sukarno (2022) menunjukkan bahwa pilihan representasi linguistik dapat digunakan untuk membangun maupun melemahkan legitimasi aktor politik melalui strategi diskursif tertentu. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa produksi makna dalam media tidak berlangsung secara netral, tetapi selalu berkaitan dengan kepentingan sosial, ideologis, dan relasi kuasa yang bekerja di balik proses komunikasi.

Dalam ranah linguistik kritis, perkembangan tersebut memperluas penerapan Analisis Wacana Kritis (AWK) dari analisis teks konvensional menuju pembacaan praktik diskursif yang lebih dinamis dan multidimensional. Fairclough (1995) memandang bahasa sebagai praktik sosial yang bekerja melalui hubungan antara dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial dalam membentuk realitas sosial. Pendekatan ini kemudian berkembang dalam konteks media digital melalui kajian Barassi (2018) dan Lux dkk. (2019) yang menunjukkan bahwa ruang digital menghasilkan bentuk praktik wacana yang lebih cair, partisipatif, dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh institusi formal.

Berbagai penelitian mengenai Analisis Wacana Kritis (AWK), media digital, dan komunikasi politik menunjukkan bahwa bahasa memiliki peran penting dalam membentuk representasi sosial, relasi kuasa, dan legitimasi publik. Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam memandang ruang komunikasi sebagai arena produksi makna yang tidak netral dan selalu dipengaruhi oleh kepentingan ideologis maupun struktur sosial tertentu. Dalam konteks tersebut, AWK digunakan untuk menjelaskan bagaimana praktik bahasa membentuk persepsi publik terhadap isu sosial dan politik.

Kelompok penelitian pertama berfokus pada hubungan antara bahasa dan legitimasi politik melalui representasi media. Fairclough (1995), Bulan & Kasman (2018), serta Nurhayati & Sukarno (2022) menunjukkan bahwa strategi representasi dan *framing* berperan dalam membangun maupun melemahkan legitimasi aktor politik melalui pilihan bahasa dan distribusi informasi. Persamaan dari kelompok ini terletak pada penekanan bahwa produksi makna selalu berkaitan dengan relasi kuasa. Namun demikian, penelitian tersebut masih dominan menggunakan teks media dan belum secara eksplisit mengintegrasikan partisipasi publik sebagai bagian dari praktik diskursif.

Kelompok penelitian kedua menyoroti transformasi praktik wacana dalam media digital. Barassi (2018), Lux dkk. (2019), Robin, Baumann, & Kotik (2018), serta Soedarsono dkk. (2023) menunjukkan bahwa media digital menghasilkan bentuk produksi wacana yang lebih terbuka, partisipatif, dan tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh institusi formal. Persamaan penelitian dalam kelompok ini terletak pada pemahaman bahwa legitimasi sosial terbentuk melalui interaksi yang lebih cair antara institusi dan publik. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih memosisikan dinamika digital sebagai konteks komunikasi dan belum menjadikannya sebagai unit analisis linguistik yang dapat ditelusuri secara sistematis.

Kelompok penelitian ketiga mengkaji hubungan antara interaksi digital, pembentukan identitas, dan polarisasi publik. Li & Feng (2024), Hilton & Liu (2017), Bhatia & Jenks (2018), Rahman (2020), serta Garcia * Proffitt (2022) menunjukkan bahwa pembentukan makna dalam ruang digital dipengaruhi oleh kombinasi antara pilihan bahasa, visualitas media, performativitas komunikasi, dan pola interaksi daring. Persamaan dari kelompok ini adalah pengakuan terhadap meningkatnya peran pengguna dalam membentuk orientasi sosial dan identitas kolektif. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara konsisten

menjelaskan bagaimana interaksi pengguna berkontribusi terhadap pembentukan legitimasi politik melalui praktik diskursif yang dapat dianalisis secara linguistik.

Tabel 1. Sintesis Kajian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Tema Kajian	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan/Keterbatasan	Posisi Penelitian Ini
AWK dan legitimasi politik	Fairclough (1995); Bulan & Kasman (2018); Nurhayati & Sukarno (2022)	Bahasa membentuk legitimasi	Fokus pada teks media	Integrasi teks dan komentar
Wacana digital	Barassi (2018); Lux et al. (2019); Robin et al. (2018)	Media digital bersifat partisipatif	Interaksi publik belum dianalisis linguistik	Praktik diskursif digital
Interaksi dan makna digital	Li & Feng (2024); Hilton & Liu (2017); Bhatia & Jenks (2018)	Publik membentuk makna	Belum fokus legitimasi politik	Legitimasi–delegitimasi digital

Berdasarkan sintesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kekosongan utama dalam kajian sebelumnya. Pertama, dominasi analisis masih berada pada teks institusional dan representasi media. Kedua, komentar dan partisipasi publik belum diperlakukan sebagai data linguistik yang membentuk produksi makna. Ketiga, hubungan antara praktik diskursif digital dan pembentukan legitimasi politik belum dijelaskan secara integratif. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan komentar netizen, interaksi digital, dan praktik legitimasi–delegitimasi sebagai bagian dari analisis untuk memperluas pembacaan Analisis Wacana Kritis dalam konteks narasi digital.

Meskipun kajian mengenai Analisis Wacana Kritis (AWK), media digital, dan komunikasi politik telah berkembang secara luas, sintesis penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah keterbatasan konseptual dan metodologis yang membuka ruang bagi pengembangan penelitian lebih lanjut. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berorientasi pada analisis teks media, pemberitaan institusional, pidato politik formal, atau representasi yang diproduksi oleh aktor dominan. Dalam pola tersebut, publik cenderung diposisikan sebagai penerima informasi, sedangkan proses produksi makna lebih banyak diasosiasikan dengan institusi media, negara, atau elite politik. Padahal, transformasi media digital menunjukkan bahwa proses produksi dan distribusi wacana telah mengalami perubahan mendasar karena pengguna kini tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga memproduksi, menafsirkan ulang, memperluas, dan memperkuat narasi melalui praktik interaksi digital.

Kajian Barassi (2018) serta Lux dkk. (2019) memang telah menunjukkan bahwa ruang digital menghasilkan praktik diskursif yang lebih terbuka, cair, dan tidak sepenuhnya tersentralisasi. Robin, Baumann, & Kotik (2018) serta Soedarsono dkk. (2023) juga menjelaskan bahwa legitimasi sosial dalam ruang digital dibentuk melalui relasi yang semakin dinamis antara otoritas institusional dan publik. Sementara itu, Bhatia & Jenks (2018), Rahman (2020), serta Garcia & Proffitt (2022) menegaskan bahwa pembentukan makna digital dipengaruhi oleh kombinasi antara unsur linguistik, visualitas media, performativitas komunikasi, dan pola interaksi daring. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung memperlakukan dinamika digital sebagai konteks komunikasi dan belum secara konsisten mengintegrasikan interaksi pengguna sebagai bagian dari struktur produksi wacana yang dapat dianalisis secara linguistik.

Berdasarkan telaah tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga celah utama. Pertama, kajian AWK sebelumnya masih dominan menggunakan teks institusional dan belum secara sistematis memasukkan komentar pengguna sebagai data linguistik yang ikut membentuk legitimasi publik. Kedua, penelitian

mengenai wacana digital masih lebih banyak menjelaskan representasi narasi dibandingkan dengan mekanisme penyebaran dan intensifikasi narasi dalam ruang digital. Ketiga, posisi publik dalam banyak penelitian masih dipahami sebagai audiens, bukan sebagai agen diskursif yang secara aktif terlibat dalam produksi dan negosiasi makna. Keterbatasan tersebut menjadi penting karena dalam konteks sengketa publik kontemporer, proses pembentukan legitimasi tidak lagi berlangsung secara linear dari media kepada masyarakat, tetapi terbentuk melalui interaksi yang terus berubah antara institusi, platform, dan partisipasi pengguna.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini menganalisis narasi digital mengenai sengketa ijazah Presiden Joko Widodo melalui integrasi antara teks institusional dan komentar netizen menggunakan kerangka Analisis Wacana Kritis model Fairclough. Penelitian ini menempatkan praktik partisipasi publik, dinamika sirkulasi narasi digital, dan proses pembentukan legitimasi–delegitimasi sebagai bagian dari analisis praktik diskursif, bukan sekadar sebagai konteks komunikasi. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak terletak pada objek kajian semata, tetapi pada upaya memperluas pembacaan AWK terhadap praktik produksi makna dalam ruang digital yang lebih partisipatif dan terdesentralisasi. Melalui posisi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian wacana digital sekaligus memperkaya pembacaan mengenai relasi antara bahasa, media, dan legitimasi politik dalam masyarakat kontemporer.

Berdasarkan fenomena sengketa ijazah Presiden Joko Widodo yang berkembang dalam ruang publik digital, perkembangan kajian wacana digital, sintesis penelitian terdahulu, serta identifikasi kesenjangan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana praktik produksi makna dan pembentukan legitimasi berlangsung dalam ruang publik digital. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana praktik linguistik dalam narasi digital membentuk legitimasi dan delegitimasi pada tingkat teks, bagaimana praktik diskursif bekerja dalam proses produksi, distribusi, dan reproduksi narasi melalui interaksi antara media dan partisipasi publik, bagaimana relasi antara praktik linguistik, praktik diskursif, dan konteks sosial membentuk kontestasi legitimasi politik, serta bagaimana keterlibatan publik melalui komentar dan interaksi digital berkontribusi terhadap pembentukan, negosiasi, dan perluasan makna dalam narasi sengketa ijazah Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembentukan dan kontestasi legitimasi dalam narasi digital mengenai sengketa ijazah Presiden Joko Widodo melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis. Penelitian ini secara khusus bertujuan mengidentifikasi dan menjelaskan praktik linguistik yang digunakan dalam narasi digital untuk membentuk legitimasi dan delegitimasi pada tingkat teks, menganalisis praktik diskursif yang bekerja dalam proses produksi, distribusi, dan reproduksi narasi melalui interaksi antara media dan partisipasi publik, menjelaskan hubungan antara praktik linguistik, praktik diskursif, dan konteks sosial dalam membentuk kontestasi legitimasi politik di ruang publik digital, serta menganalisis kontribusi partisipasi publik melalui komentar dan interaksi digital terhadap pembentukan, negosiasi, dan perluasan makna. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian Analisis Wacana Kritis dalam konteks media digital dengan menunjukkan bahwa pembentukan legitimasi politik berlangsung melalui interaksi antara praktik bahasa, dinamika diskursif, dan keterlibatan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Analisis Wacana Kritis (AWK) model Fairclough untuk menganalisis pembentukan dan kontestasi legitimasi dalam narasi digital mengenai sengketa ijazah Presiden Joko Widodo. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis hubungan

antara praktik linguistik, praktik diskursif, dan konteks sosial dalam produksi makna pada ruang publik digital. Analisis dilakukan melalui tiga dimensi yang saling berhubungan, yaitu analisis teks (*text*), praktik diskursif (*discursive practice*), dan praktik sosial (*social practice*).

Data penelitian terdiri atas konten video dan komentar pengguna yang diperoleh dari platform YouTube pada kanal CNN Indonesia dan KompasTV yang secara eksplisit membahas isu sengketa ijazah Presiden Joko Widodo. Pengumpulan data dilakukan pada periode unggahan April–Juni 2025. Pemilihan data dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan tingkat keterlihatan dan intensitas interaksi publik terhadap isu yang diteliti.

Sebanyak 8 video dipilih sebagai sumber data utama yang terdiri atas 4 video dari CNN Indonesia dan 4 video dari KompasTV. Pemilihan video didasarkan pada tiga kriteria: (1) secara substantif membahas sengketa ijazah Presiden Joko Widodo; (2) memperoleh minimal 500.000 tayangan (*views*) sebagai indikator jangkauan publik; dan (3) memiliki minimal 2.000 komentar sebagai indikator keterlibatan dan viralitas diskursif. Dalam penelitian ini, viralitas dipahami sebagai tingkat penyebaran dan intensitas interaksi yang tecermin melalui kombinasi jumlah tayangan, jumlah komentar, dan tingkat reproduksi percakapan pada ruang komentar.

Dari keseluruhan data yang terkumpul, penelitian ini menganalisis 300 komentar pengguna yang dipilih menggunakan *purposive sampling*. Proses pemilihan komentar mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu (1) komentar memiliki relevansi langsung terhadap isu sengketa ijazah; (2) komentar memuat ekspresi evaluatif, legitimatif, atau delegitimatif; (3) komentar menunjukkan interaksi antarpengguna; dan (4) komentar tidak berupa duplikasi, spam, atau respons nonverbal. Pemilihan jumlah komentar dilakukan untuk menjaga kedalaman analisis linguistik sekaligus memastikan representasi variasi posisi diskursif dalam ruang digital.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital dan pencatatan sistematis terhadap video, transkrip, judul, metadata unggahan, dan komentar pengguna. Seluruh data kemudian dikonversi ke dalam korpus analisis dan dikodekan berdasarkan kategori linguistik dan praktik diskursif. Analisis pada tingkat teks dilakukan dengan mengidentifikasi pilihan leksikal, modalitas, nominalisasi, evaluasi, konstruksi agensi, dan strategi representasi. Pada tingkat praktik diskursif, analisis diarahkan pada proses produksi, distribusi, dan reproduksi narasi melalui interaksi antara media dan publik. Sementara itu, pada tingkat praktik sosial, analisis difokuskan pada relasi antara praktik bahasa, legitimasi politik, dan dinamika komunikasi digital.

Untuk meningkatkan keterlacakan dan kredibilitas penelitian, proses analisis dilakukan melalui pembacaan berulang, kategorisasi data, dan triangulasi antarunit data yang meliputi teks video, komentar pengguna, dan konteks sosial yang melingkupinya. Validitas interpretasi dijaga melalui konsistensi prosedur analisis, dokumentasi proses pengodean, serta pemeriksaan ulang keterhubungan antara temuan linguistik, praktik diskursif, dan interpretasi sosial sehingga memungkinkan penelitian direplikasi secara analitis pada konteks serupa.

TEMUAN PENELITIAN

Praktik Linguistik dan Produksi

Analisis terhadap data transkrip dan komentar menunjukkan bahwa narasi sengketa ijazah Presiden Joko Widodo dibangun melalui strategi linguistik yang berbeda antara aktor institusional, oposisi, dan publik digital. Perbedaan tersebut tampak terutama pada penggunaan modalitas, nominalisasi, pelabelan evaluatif, konstruksi pasif, dan penghilangan agensi.

Berdasarkan data dari forum diskusi CNN Indonesia, ditemukan bahwa pembentukan legitimasi dilakukan melalui abstraksi institusional dan delegitimasi dilakukan melalui pelabelan langsung terhadap objek sengketa.

Tabel 2. Analisis Linguistik Narasi Sengketa Ijazah

Kutipan	Fitur Linguistik	Fungsi Diskursif	Interpretasi	Konsep
“masyarakat ingin lihat ijazah asli”	modalitas deontik implisit	tekanan legitimasi	publik menjadi evaluator	legitimasi partisipatif
“keabsahan ijazah telah diverifikasi dan dinyatakan sah”	nominalisasi + pasif	naturalisasi otoritas	institusi sebagai sumber kebenaran	legitimasi terdistribusi
“ijazah aspal”	pelabelan paradoksal	delegitimasi simbolik	stigma menggantikan pembuktian	delegitimasi
“semuanya akan dibuka di pengadilan”	pasivisasi + futuritas	penundaan pembuktian	transfer legitimasi ke hukum	legitimasi prosedural

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa bahasa tidak digunakan untuk menyampaikan informasi semata, tetapi untuk membangun posisi epistemik terhadap publik. Narasi institusional cenderung menggunakan nominalisasi dan pasivisasi untuk menghasilkan kesan objektif, sedangkan narasi oposisional menggunakan pelabelan langsung yang mempercepat proses delegitimasi.

Praktik Diskursif dan Sirkulasi Narasi

Analisis berikut menunjukkan bagaimana narasi tidak berhenti pada produksi media, tetapi direproduksi melalui komentar publik. Data komentar memperlihatkan bahwa pengguna tidak hanya merespons informasi, tetapi juga ikut memproduksi orientasi legitimasi.

Tabel 3. Frekuensi Kategori Komentar Netizen

Kategori	Frekuensi	Persentase
Kebohongan–Kebenaran	4	57,1%

Distribusi komentar memperlihatkan bahwa mayoritas komentar membingkai isu sebagai persoalan pembuktian moral dan keabsahan publik, bukan sekadar prosedur administratif. Untuk memperjelas mekanisme linguistiknya, dilakukan identifikasi pola modalitas.

Tabel 4. Pola Modalitas dalam Komentar

Kutipan	Jenis Modalitas	Fungsi
“Tunjukkan ijazahnya”	deontik	tuntutan
“harus diadili”	deontik	tekanan publik
“akan terbongkar”	epistemik	prediksi kepastian
“kalau asli...”	kondisional	insiniasi

Temuan menunjukkan dominasi modalitas deontik yang memperlihatkan bahwa publik tidak memosisikan diri sebagai penerima informasi, tetapi sebagai pihak yang memiliki otoritas evaluatif terhadap aktor politik.

Partisipasi Publik dan Negosiasi Makna

Pada tingkat partisipasi publik, ditemukan bahwa komentar netizen tidak hanya memperkuat narasi media, tetapi juga menggeser arena legitimasi ke ruang komentar digital. Data wawancara KompasTV memperlihatkan kecenderungan penggunaan konstruksi pasif dan nominalisasi untuk menempatkan institusi hukum sebagai sumber legitimasi utama.

Tabel 5. Nominalisasi dan Penghapusan Agensi

Kutipan	Fenomena	Efek Diskursif
“akan diserahkan ke proses hukum”	nominalisasi	abstraksi prosedural
“akan dibuka di pengadilan”	pasif	depersonalisasi
“bukti-bukti akan dibuka”	penghapusan agensi	objektivasi

Sebaliknya, komentar publik memperlihatkan pola yang berbeda.

Tabel 6. Strategi Partisipasi Publik

Pola	Fungsi
dukungan	reproduksi legitimasi
kritik	resistensi
pengulangan	intensifikasi
evaluasi	negosiasi makna

Temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi tidak hanya diproduksi melalui institusi, tetapi juga melalui akumulasi respons publik yang berulang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan empat pola utama.

Tabel 7. Sintesis Temuan

Temuan	Bukti Linguistik	Dampak
Legitimasi dibentuk melalui bahasa	nominalisasi, pasif	naturalisasi
Delegitimasi dibentuk melalui pelabelan	evaluatif	stigma
Publik menjadi aktor wacana	imperatif, modalitas	redistribusi otoritas
Narasi menyebar secara partisipatif	repetisi komentar	legitimasi digital

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa produksi legitimasi dalam narasi digital tidak berlangsung secara linear dari institusi kepada publik, tetapi dibentuk melalui interaksi antara pilihan linguistik, reproduksi komentar, dan praktik partisipatif dalam ruang digital.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa narasi digital mengenai sengketa ijazah Presiden Joko Widodo tidak berkembang sebagai proses pertukaran informasi yang netral, tetapi sebagai arena produksi, distribusi, dan negosiasi legitimasi yang berlangsung melalui interaksi antara praktik linguistik, dinamika diskursif, dan partisipasi publik. Berdasarkan hasil analisis, legitimasi maupun delegitimasi tidak dibentuk terutama oleh validitas faktual suatu klaim, tetapi oleh cara klaim tersebut direpresentasikan, disirkulasikan, dan diposisikan dalam ruang publik digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa proses pembentukan makna dalam lingkungan digital tidak dapat dijelaskan hanya melalui hubungan sederhana antara produsen pesan dan penerima pesan, tetapi harus dipahami sebagai proses yang berlangsung secara multidimensi melalui interaksi antara bahasa, media, platform, dan pengguna.

Dari perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, temuan ini memperlihatkan bahwa praktik bahasa bekerja melalui hubungan yang saling terhubung antara tingkat teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Pada tingkat teks, hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi dibentuk melalui penggunaan modalitas deontik, konstruksi pasif, nominalisasi, dan strategi evaluatif yang memungkinkan aktor tertentu memperoleh posisi epistemik yang lebih kuat dibandingkan dengan aktor lainnya. Penggunaan bentuk pasif dan nominalisasi menghasilkan efek objektivasi karena tindakan sosial tidak lagi dikaitkan dengan pelaku tertentu, tetapi dipresentasikan sebagai proses yang tampak netral dan institusional. Sebaliknya, penggunaan pelabelan evaluatif dan modalitas hipotetik dalam komentar publik menghasilkan ruang resistensi yang memungkinkan publik mempertanyakan, menolak, atau menegosiasikan legitimasi yang

diproduksi institusi. Dalam kerangka Fairclough, fenomena tersebut menunjukkan bahwa bahasa tidak sekadar merefleksikan realitas sosial, tetapi secara aktif berpartisipasi dalam membentuk dan mempertahankan struktur kuasa melalui praktik representasi dan distribusi makna.

Pada tingkat praktik diskursif, penelitian ini menemukan bahwa produksi legitimasi tidak berlangsung secara linear dari media kepada audiens, tetapi terbentuk melalui mekanisme reproduksi dan redistribusi narasi yang dilakukan oleh pengguna. Temuan ini memperluas pembacaan Fairclough mengenai produksi dan konsumsi teks dengan menunjukkan bahwa dalam ruang digital, pengguna tidak hanya berperan sebagai pembaca, tetapi juga sebagai produsen sekunder yang ikut menentukan arah perkembangan wacana. Dalam konteks sengketa ijazah, komentar publik tidak berfungsi sebagai respons pasif terhadap pemberitaan media, tetapi sebagai tindakan diskursif yang ikut mengorganisasi makna, menentukan relevansi isu, serta membentuk orientasi legitimasi terhadap aktor politik. Dengan demikian, praktik diskursif dalam lingkungan digital tidak lagi dapat dipahami sebagai rangkaian komunikasi satu arah, tetapi sebagai sistem produksi makna yang berlangsung secara simultan dan terus berubah.

Temuan tersebut kemudian dapat dijelaskan melalui konsep *participatory virality*. Berdasarkan hasil penelitian, penyebaran narasi tidak terjadi semata karena jangkauan media atau intensitas publikasi institusional, tetapi karena keterlibatan publik yang secara aktif mereproduksi, memperluas, dan mempertahankan visibilitas isu melalui komentar, evaluasi, pengulangan, dan interaksi antarpengguna. Dalam konteks ini, viralitas tidak dipahami sebagai ukuran popularitas konten, melainkan sebagai mekanisme partisipatif yang memungkinkan suatu narasi memperoleh daya tahan dan daya pengaruh dalam ruang publik digital. Partisipasi pengguna menjadi elemen sentral karena setiap tindakan komentar, persetujuan, penolakan, atau reproduksi narasi ikut memperpanjang siklus diskursif dan memperbesar peluang suatu isu untuk tetap relevan. Temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi politik dalam ruang digital tidak lagi diproduksi secara eksklusif oleh aktor formal, tetapi dinegosiasikan melalui keterlibatan publik yang terus-menerus.

Lebih jauh, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembentukan legitimasi berlangsung melalui mekanisme yang dapat dijelaskan menggunakan konsep *distributed legitimacy*. Dalam penelitian ini, legitimasi tidak muncul dari satu sumber otoritas tunggal, melainkan dibentuk melalui akumulasi berbagai bentuk pengakuan yang berasal dari institusi media, narasumber, komentar publik, prosedur hukum, dan sirkulasi digital. Distribusi legitimasi ini tampak melalui kecenderungan penggunaan konstruksi pasif dan penghilangan agensi yang memindahkan fokus dari individu menuju institusi atau prosedur. Akibatnya, legitimasi tidak lagi dipersepsikan sebagai hasil tindakan aktor tertentu, tetapi sebagai konsekuensi dari proses yang dianggap objektif dan sah secara sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa otoritas dalam ruang digital bersifat terdistribusi dan terus dinegosiasikan melalui interaksi antaraktor yang saling memperkuat maupun saling menantang.

Selain itu, temuan penelitian juga menunjukkan pentingnya memahami peran *algorithmic circulation* dalam pembentukan makna digital. Meskipun penelitian ini tidak menganalisis algoritma platform secara teknis, hasil penelitian memperlihatkan bahwa visibilitas narasi dipengaruhi oleh pola reproduksi interaksi yang meningkatkan peluang suatu isu untuk terus muncul dan mendapatkan perhatian publik. Dalam konteks tersebut, algoritma tidak diposisikan sebagai aktor independen yang menentukan arah komunikasi, tetapi sebagai infrastruktur distribusi yang memperkuat dinamika partisipatif pengguna. Narasi yang memperoleh lebih banyak komentar, respons, dan reproduksi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan eksistensinya dalam ruang publik digital. Dengan demikian, penyebaran legitimasi dalam lingkungan digital tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan hubungan antara praktik bahasa, aktivitas pengguna, dan logika distribusi platform.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sengketa ijazah Presiden Joko Widodo tidak dapat dibaca semata sebagai konflik mengenai keabsahan dokumen akademik, tetapi sebagai peristiwa diskursif yang menunjukkan bagaimana legitimasi politik diproduksi, diperdebatkan, dan dinegosiasikan dalam ruang publik digital. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada perluasan pembacaan Analisis Wacana Kritis ke arah pemahaman bahwa produksi makna dalam media digital berlangsung melalui relasi yang lebih kompleks antara pilihan linguistik, praktik diskursif, partisipasi publik, dan distribusi visibilitas. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat digital kontemporer, legitimasi bukan lagi kondisi yang dimiliki secara tetap oleh institusi, melainkan hasil dari proses negosiasi yang berlangsung terus-menerus melalui praktik komunikasi yang partisipatif dan terdesentralisasi.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa narasi digital mengenai sengketa ijazah Presiden Joko Widodo tidak berkembang sebagai proses pertukaran informasi yang netral, tetapi sebagai praktik diskursif yang membentuk dan mempertentangkan legitimasi dalam ruang publik digital. Berdasarkan analisis terhadap data transkrip media dan komentar pengguna, ditemukan bahwa pembentukan legitimasi berlangsung melalui penggunaan strategi linguistik tertentu, terutama modalitas, nominalisasi, konstruksi pasif, pelabelan evaluatif, dan penghilangan agensi yang menghasilkan posisi epistemik yang berbeda bagi aktor-aktor yang terlibat. Pada tingkat praktik diskursif, narasi tidak diproduksi secara linear oleh institusi media, tetapi direproduksi melalui komentar, evaluasi, dan interaksi publik yang memperluas serta mempertahankan visibilitas isu. Temuan ini juga menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak lagi dapat dipahami sebagai bentuk penerimaan pesan, melainkan sebagai praktik produksi makna yang ikut menentukan arah pembentukan legitimasi politik dalam ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini menjawab bahwa pembentukan legitimasi dalam sengketa publik kontemporer merupakan hasil interaksi antara praktik linguistik, reproduksi narasi, dan keterlibatan pengguna dalam lingkungan komunikasi digital.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan Analisis Wacana Kritis dengan memperluas penerapan kerangka Fairclough ke dalam konteks narasi digital yang bersifat partisipatif dan terdesentralisasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa relasi antara teks, praktik diskursif, dan praktik sosial dalam media digital tidak lagi berlangsung melalui struktur komunikasi satu arah, tetapi melalui jaringan interaksi yang memungkinkan publik menjadi bagian dari produksi dan distribusi wacana. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *participatory virality* dapat dipahami sebagai mekanisme reproduksi legitimasi melalui keterlibatan pengguna, sedangkan *distributed legitimacy* menjelaskan bagaimana legitimasi dibentuk melalui akumulasi pengakuan yang berasal dari institusi, prosedur, dan interaksi publik. Pada saat yang sama, temuan mengenai *algorithmic circulation* memperlihatkan bahwa visibilitas dan keberlangsungan suatu narasi dipengaruhi oleh intensitas reproduksi dan interaksi dalam ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada perluasan pembacaan AWK dari analisis representasi menuju analisis produksi legitimasi dalam lingkungan digital.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya memahami bahwa pembentukan opini publik di ruang digital tidak hanya dipengaruhi oleh isi informasi, tetapi juga oleh cara informasi diproduksi, disirkulasikan, dan dinegosiasikan melalui interaksi publik. Implikasi tersebut relevan bagi pengembangan literasi digital, komunikasi politik, dan kajian media karena memperlihatkan bahwa publik memiliki peran yang semakin besar dalam membentuk legitimasi sosial dan politik. Bagi penelitian linguistik terapan dan

studi wacana digital, hasil penelitian ini membuka kemungkinan penggunaan pendekatan yang lebih integratif dengan menghubungkan analisis linguistik mikro dan dinamika komunikasi digital yang lebih luas.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data penelitian hanya difokuskan pada narasi digital yang berkembang melalui video dan komentar pada platform YouTube, sehingga belum mencakup dinamika lintas platform seperti X, Instagram, atau TikTok. Kedua, penelitian ini berfokus pada analisis praktik diskursif dan belum melakukan pengukuran kuantitatif terhadap mekanisme distribusi algoritmik yang memengaruhi visibilitas konten. Ketiga, penelitian ini menggunakan rentang waktu dan korpus yang terbatas, sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi terhadap seluruh praktik komunikasi politik digital. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan data melalui pendekatan lintas platform, mengintegrasikan analisis multimodal, serta menggabungkan Analisis Wacana Kritis dengan pendekatan komputasional untuk memahami hubungan antara praktik bahasa, infrastruktur platform, dan pembentukan legitimasi secara lebih komprehensif.

PERNYATAAN BEBAS KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis dengan ini menyatakan bahwa artikel ini sepenuhnya bebas dari konflik kepentingan apa pun terkait pengumpulan data, analisis, dan proses editorial, serta proses publikasi secara umum.

REFERENSI

- Aviandy, M., & Saleh, M. I. (2020). Representasi ideologi generasi muda Uni Soviet dalam lirik lagu Mama—Anarxija (Mama Anarki) dari Kino. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 4(2), 121–130. <https://doi.org/10.30595/jssh.v4i2.8204>
- Barassi, V. (2018). Social media activism, self-representation and the construction of political biographies. In G. Meikle (Ed.), *The Routledge companion to media and activism* (1st ed., pp. 142–150). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315475059-15>
- Bessi, A., Coletto, M., Davidescu, G. A., Scala, A., Caldarelli, G., & Quattrociocchi, W. (2015). Science vs conspiracy: Collective narratives in the age of misinformation. *PLOS ONE*, 10(2), Article e0118093. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118093>
- Bhatia, A., & Jenks, C. J. (2018). Fabricating the American dream in US media portrayals of Syrian refugees: A discourse analytical study. *Discourse & Communication*, 12(3), 221–239. <https://doi.org/10.1177/1750481318757763>
- Bulan, A., & Kasman, K. (2018). Critical discourse analysis of Ahok's speech in Kepulauan Seribu. *TRANSFORMATIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 2(1), 50–61. <https://doi.org/10.31002/transformatika.v2i1.555>
- Chen, L. (2017). The performative space for city identity narrative: A case study of Suzhou Museum. *Communication and the Public*, 2(1), 52–66. <https://doi.org/10.1177/2057047317695813>
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Garcia, C. J., & Proffitt, J. M. (2022). Recontextualizing Barstool Sports and misogyny in online US sports media. *Communication & Sport*, 10(4), 730–745. <https://doi.org/10.1177/21674795211042409>
- Hilton, D. J., & Liu, J. H. (2017). History as the narrative of a people: From function to structure and content. *Memory Studies*, 10(3), 297–309. <https://doi.org/10.1177/1750698017701612>
- Li, X. (Leah), & Feng, J. (2024). Security and digital nationalism: Speaking the brand of Australia on social media. *Media International Australia*, 191(1), 37–57. <https://doi.org/10.1177/1329878X221139581>

- Liu, P. L. (2020). COVID-19 information seeking on digital media and preventive behaviors: The mediation role of worry. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 23(10), 677–682. <https://doi.org/10.1089/cyber.2020.0250>
- Lovelock, M. (2017). Catching a catfish: Constructing the “good” social media user in reality television. *Television & New Media*, 18(3), 203–217. <https://doi.org/10.1177/1527476416662709>
- Lux, Z. A., Beierle, F., Zickau, S., & Gondor, S. (2019). Full-text search for verifiable credential metadata on distributed ledgers. In *2019 Sixth International Conference on Internet of Things: Systems, Management and Security (IOTSMS)* (pp. 519–528). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IOTSMS48152.2019.8939249>
- Mullet, D. R. (2018). A general critical discourse analysis framework for educational research. *Journal of Advanced Academics*, 29(2), 116–142. <https://doi.org/10.1177/1932202X18758260>
- Nurhayati, E., & Sukarno, S. (2022). Mengungkap sikap Majalah Tanwirul Afkar dalam menanggapi kritikan BEM UI terhadap Jokowi: Analisis wacana kritis Norman Fairclough. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(2), 110–124. <https://doi.org/10.46937/20202240654>
- Rahman, L. (2020). Virtual piety and Muslim traditionalism mainstreaming: The digital activism of Bangkitmedia.com and Kyaiku.com. *FIKRAH*, 8(2), 209–230. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i2.7914>
- Ranabhat, B. K. (2022). Critical insights: A perspective on discourse analysis. *Journal of Language and Linguistics in Society*, 22, 30–36. <https://doi.org/10.55529/jlls.22.30.36>
- Robin, J., Baumann, H. M., & Kotik, J. (2018). Identity coactivation: Person and situation influences and the mediating role of experienced conflict. *Journal of Applied Social Psychology*, 48(8), 411–423. <https://doi.org/10.1111/jasp.12521>
- Soedarsono, M., Hajar, I., Musriani, M., Kaharuddin, K., & Musawir, M. (2023). Benturan ideologi TVOne dan Kompas TV dalam konstruksi pemberitaan korupsi. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 9(2), 1506–1512. <https://doi.org/10.30605/onoma.v9i2.2918>
- Starbird, K., Spiro, E., Edwards, I., Zhou, K., Maddock, J., & Narasimhan, S. (2016). Could this be true?: I think so! Expressed uncertainty in online rumoring. In *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 360–371). ACM. <https://doi.org/10.1145/2858036.2858551>
- Zhang, X. (2023). Study on approaching critical discourse analysis: Taking Biden’s 2021 interim national security strategic guidance as an example. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 7, 11–21. <https://doi.org/10.54097/ehss.v7i.3998>